



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU

Jl. Jend. Sudirman No.438 Pekanbaru, Telp. (0761) 855734

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Provinsi Riau Tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun serta disesuaikan/ mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sekaligus merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2021.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Provinsi Riau Tahun 2021 masih terdapat kekurangan, maka diharapkan masukan positif dalam penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Provinsi Riau Tahun 2021 agar lebih baik untuk mewujudkan Riau tangguh dalam menghadapi bencana. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Tahun 2021, semoga bermanfaat dalam kemajuan pembangunan khususnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Riau agar semakin tangguh dalam menghadapi bencana.

Pekanbaru, Februari 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU



M. EDY AFRIZAL, SE, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19730421 199203 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Riau	1
1.3 Tugas dan Fungsi BPBD Provinsi Riau	2
1.4 Aspek Strategis BPBD Provinsi Riau	12
1.5 Permasalahan Utama Penanggulangan Bencana Provinsi Riau	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis.....	20
2.2 Perjanjian Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPBD TAHUN 2021	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	26
3.2 Realisasi Anggaran	33
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan Umum	34
4.1 Langkah Strategis untuk Peningkatan Kinerja di masa datang	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

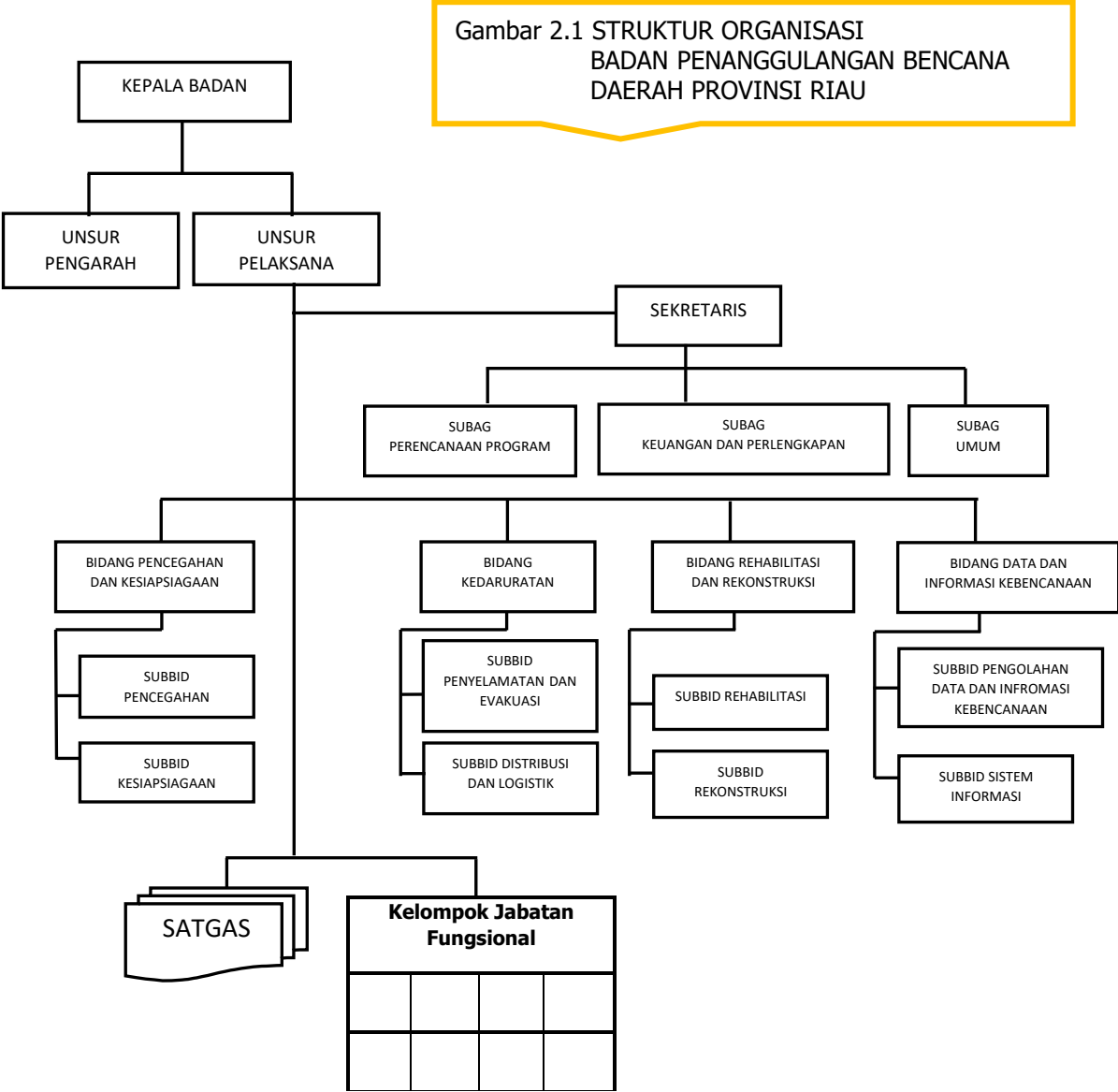
Oleh karena itu melalui penyusunan LKjIP BPBD Provinsi Riau Tahun 2021 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BPBD Provinsi Riau;
2. Mendorong BPBD Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPBD Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BPBD Provinsi Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memberikan gambaran mengenai kinerja yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau, berikut adalah gambaran umum BPBD Provinsi Riau dari sisi sumber daya manusia dan sumber daya modal.

1.2 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Riau

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :



Sumber : Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2019

1.3 Tugas dan Fungsi BPBD Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, Tugas dan Fungsi BPBD Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

- I. Kepala Badan Ex. Officio Sekretaris Daerah Provinsi Riau yang membawahi Unsur Pegaarah dan Unsur Pelaksana, namun hingga saat ini Unsur Pengarah BPBD Provinsi Riau belum dibentuk dikarenakan keterbatasan anggaran.

II. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan, membawahi:

1. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat keprotokolan serta administrasi kepegawaian, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan penyajian data, penyusunan program dan rencana kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola keuangan serta menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta mengelola administrasi kepegawaian.
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana, memfasilitasi upaya pengurangan resiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
 - b. Sub Bidang kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana serta bimbingan teknis penanggulangan bencana.

3. Bidang kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan hidup dasar dan logistik pada saat tanggap darurat, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang penyelamatan dan evakuasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian keadaan darurat, memfasilitasi pengerahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana; dan
 - b. Sub Bidang distribusi dan logistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian tingkat kerusakan akibat bencana, perlindungan kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik.
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan lingkungan, prasarana dan prasarana umum dan keagamaan, pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi dan sosial budaya, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban; dan
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya dan sarana prasarana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
5. Bidang Data dan Informasi yang dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan dan Subbidang Sistem Informasi, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data spasial dan statistik serta pengembangan metode dan standar pengelolaan basis data penanggulangan bencana; dan
- b. Sub Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian informasi bencana serta pengelolaan dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis pada unsur pengarah, unsur pelaksana, sekretariat, bidang pencegahan dan kesiap siagaan, bidang kedaruratan dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur pengarah, unsur pelaksana, sekretariat, bidang pencegahan dan kesiap siagaan, bidang kedaruratan dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada unsur pengarah, unsur pelaksana, sekretariat, bidang pencegahan dan kesiap siagaan, bidang kedaruratan dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah pada unsur pengarah, unsur pelaksana, sekretariat, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Aspek Strategis BPBD Provinsi Riau

1.4.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya yang dimiliki baik personil maupun sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau adalah sebanyak 57 orang. Berikut ini disajikan data kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau:

1. Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Gaji.

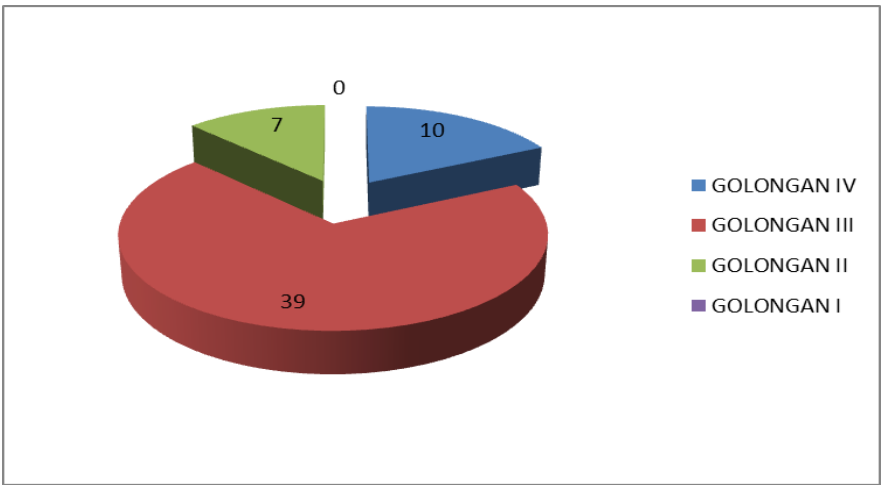
Data Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau
Berdasarkan Golongan Ruang Gaji

No.	GOLONGAN RUANG GAJI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	GOLONGAN IV	9	1	10	17,86
2	GOLONGAN III	32	7	39	69,64
3	GOLONGAN II	6	1	7	12,50
4	GOLONGAN I	0	0	0	0
JUMLAH		47	9	56	100

Sumber Data : Desember 2021

Jika melihat pada tingkat Golongan Ruang Gaji aparatur BPBD Provinsi Riau, secara total berjumlah 56 orang dengan komposisi pegawai yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 10 Orang atau 17,86%, Golongan III sebanyak 39 Orang atau 69,64%, Sedang Golongan Ruang Gaji terkecil adalah Golongan II berjumlah 7 orang atau sekitar 12,50%.

Sedangkan bila diklasifikasikan Berdasarkan Golongan Ruang Gaji, maka sebagaimana terlihat pada Grafik 2.1. pegawai BPBD Provinsi Riau terbanyak berada pada golongan III, atau sejumlah 39 orang (69.64%).



Gambar 2.2. Keadaan Golongan Ruang Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau Tahun 2021

2. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Jabatan

Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau berjumlah 56 orang, berdasarkan Jabatan terbagi dalam 5 (lima) kelompok sebagaimana data pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2.
Data Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau
Berdasarkan Jabatan

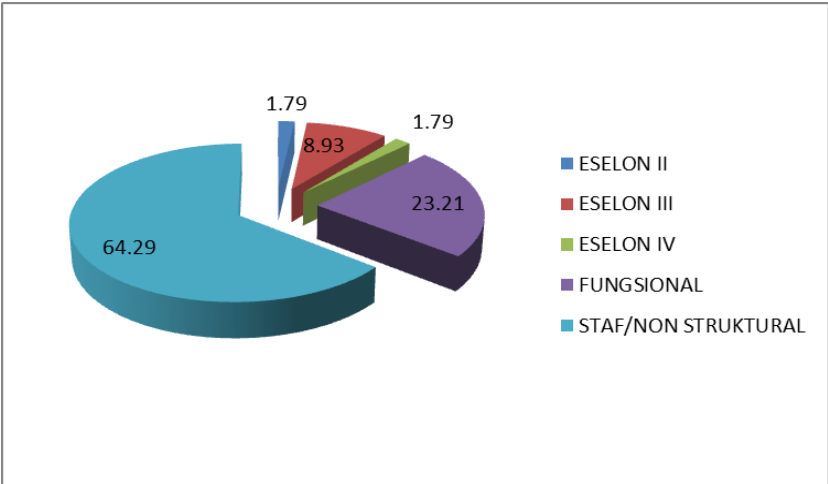
<i>S</i> No.	JABATAN / ESELON	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
<i>m</i> 1	ESELON II	1	0	1	1.75
<i>b</i> 2	ESELON III	5	0	5	8.78
<i>e</i> 3	ESELON IV	1	0	1	1.75
<i>r</i> 4	FUNGSIONAL	10	3	13	23.21
<i>d</i> 5	STAF/NON STRUKTURAL	30	6	36	64.29
<i>S</i> <i>u</i>	JUMLAH	47	9	56	100

Sumber Data : Desember 2021

Dari sejumlah 56 pegawai BPBD Provinsi Riau, terdapat 1 orang dengan jabatan eselon II, yaitu Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau; 5 orang dengan jabatan eselon III, yang terdiri dari Sekretaris dan 4 Kepala Bidang, serta 1 eselon IV, 13 orang fungsional (penyetaraan Eselon IV menjadi fungsional) dan sisanya adalah staf. Hal ini sesuai dengan Struktur Organisasi BPBD Provinsi Riau.

Hingga penyusunan Renstra BPBD Provinsi Riau tahun 2019 – 2024, kondisi pejabat Eselon Pada BPBD Provinsi Riau telah terpenuhi dan tidak terdapat kekosongan jabatan sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 2.2 diatas.

Secara Sederhana Gambaran Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau Menurut Jabatan/Eselon dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar 2.3.
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau
Berdasarkan Jabatan

3. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

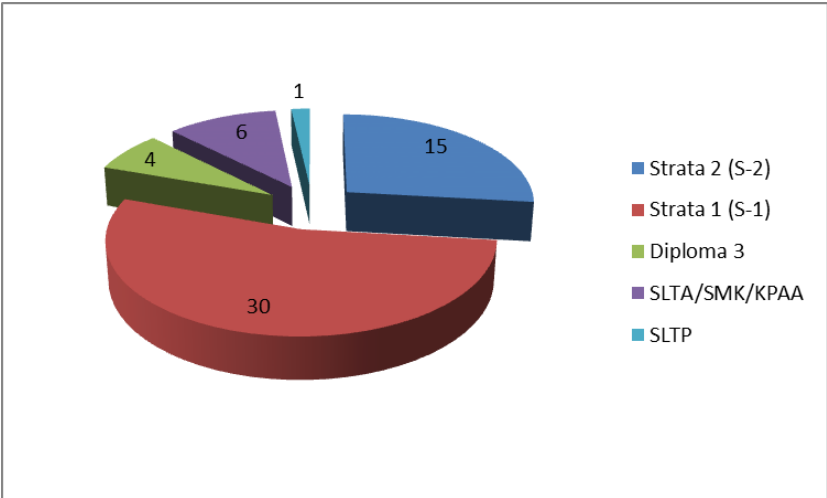
Dari data pada Tabel 2.3 diketahui bahwa pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan BPBD Provinsi Riau didominasi oleh tingkatan Strata I (S.1) yang berjumlah 22 orang atau 47,80%.

Tabel 2.3.
Data Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	Strata 2 (S-2)	14	1	15	26,79 %
2	Strata 1 (S-1)	24	6	30	53,57 %
3	Diploma 3	3	1	4	7,14 %
4	SLTA/SMK/KPAA	5	1	6	10,71 %
5	SLTP	1	0	1	1,79 %
JUMLAH		47	9	56	100 %

Sumber Data : Desember 2021

Secara umum tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau cukup Baik, dimana dari 56 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat 15 orang atau 26,79 % berpendidikan Sarjana Strata 2 (S2), terdapat 30 Orang atau 53,57% untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpendidikan Sarjana Strata 1 (S1), yang berpendidikan Diploma 3 sebanyak 4 Orang atau 7,14%, sedangkan yang berpendidikan SLTA/SMK terdapat 6 orang atau 10,71%, lalu sisanya 1 orang berpendidikan SLTP atau 1,79%. Secara sederhana dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.4.
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau
menurut Tingkat Pendidikan Formal

4. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan

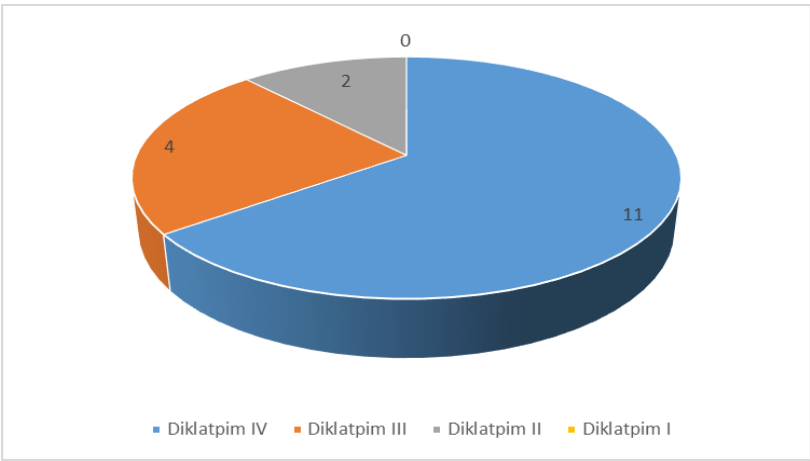
Data pada Tabel 2.4. Mengambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan berjumlah 17 orang.

Tabel 2.4.
Data Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau
Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Diklatpim IV	11
3	Diklatpim III	4
4	Diklatpim II	2
5	Diklatpim I	0
JUMLAH		17

Sumber Data : Desember 2020

Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.5.
Tingkat Pendidikan Penjenjangan Pegawai Negeri Sipil
Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Riau Tahun 2020

5. Fasilitas Penunjang (Perlengkapan Kantor)

Dalam kaitannya untuk mendukung pekerjaan, BPBD Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau memiliki 1 (satu) Gedung yang terdiri 3 (tiga) lantai. Setiap lantai dan ruangan kerja dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan Air Condition (AC) dan didukung oleh Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) seperti Komputer, Printer, Mesin Scanner dan Fotocopi, kendaraan dinas, serta jaringan WiFi untuk mempermudah akses informasi global.

Tabel 2.5
 Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) BPBD Provinsi Riau

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	
		(DALAM BIDANG/UNIT/BUAH)	
	Mesin dan Peralatan	985	
	Alat-alat Besar	122	
	Alat-Alat Besar Darat	5	
1	Genset	1	Unit
3	Forklift	1	Unit
4	Alat Pengangkat Lain-lain	3	Unit
	Alat-alat Bantu	117	
4	Alat Pompa	13	
5	Mesin pompa apung porTabel	10	
6	Mesin pompa air jinjing	36	Unit
7	Tangki lipat 1000 liter	10	Unit
8	Tangki lipat 2000 liter	12	Unit
9	Tangki lipat 4000 liter	5	Unit
10	Selang ukuran 1,5 inchi (50 gulung)	1	Unit
11	Selang ukuran 2,5 inchi (15 gulung)	1	Unit
12	Y connection	10	Unit
13	Nozzle	10	Unit
14	Tangga	2	Unit
15	Genset	4	Unit
16	Alat Fogging	1	Unit
17	Alat Fogging	1	Unit
18	Mesin Pompa air	1	Unit
	Alat-alat Angkutan	27	
	Alat Angkutan Darat Bermotor	5	
19	Mobil Jeep	1	Unit
20	Station Wagon	1	Unit
21	Station Wagon	1	Unit
22	Station Wagon	1	Unit

23	Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	1	Unit
	Alat Angkutan Apung Bermotor	10	
23	Mesin tempel perahu karet	10	Unit
	Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	12	
25	Perahu karet Cruiser CRD-al 430R	2	Unit
25	Perahu karet Cruiser CRD-al 500R	10	Unit
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	50	
	Alat Bengkel Bermesin	1	
26	Perkakas Bengkel Lain-lain	1	Set
	Alat Bengkel Tak Bermesin	41	
27	Peralatan Tukang Besi Lain-lain	41	Buah
	Alat Ukur	8	
28	Global Postioning System	7	Buah
29	System Peringatan Dini Banjir	1	Buah
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	470	
	Alat Kantor	47	
30	AC (Air Conditioner)	2	Unit
31	Alat Pendingin (AC)	4	Unit
32	Filling Cabinet	7	Unit
33	Lemari kaca	4	Unit
34	Lemari Arsip Pintu Sorong Kaca	3	Unit
35	Mesin Hitung	1	Unit
36	Lemari kayu	3	Unit
37	Filling Kabinet	8	Unit
38	Air Conditioner	6	Unit
39	AC standing floor	1	Unit
40	Papan visual elektronik	1	Unit
41	Lemari arsip pintu sorong	4	Unit

42	Lemari Tempat Photo	1	Unit
43	Alat Absensi	2	Unit
	Alat Rumah Tangga	150	
44	Kursi Kerja	6	Buah
45	Tenda	10	Buah
46	Kulkas	5	Buah
47	Kompore set lapangan	2	Buah
48	Dispenser	1	Buah
49	Penyekat ruangan	1	Buah
50	Matras	8	Buah
51	Sleeping bad	8	Buah
52	Lemari Arsip	2	Buah
53	Vitrage/gorden	1	Buah
54	Tenda	1	Buah
55	Neon box visi misi	1	Buah
56	Vitrage/gorden	1	Buah
57	Neon box logo prov. Riau	1	Buah
58	Neon box logo BPBD	1	Buah
59	Neon box struktur orgnanisasi	1	Buah
60	Neon box plang nama	1	Buah
61	Meja Rapat	1	Buah
62	Lemari Arsip	3	Buah
63	Exhaust Fan	6	Buah
64	Meja Receptionis	1	Buah
65	Televisi LED 60 Inchi	1	Buah
66	Lemari Arsip Pintu Sorong	4	Buah
67	Vacuum Cleaner	1	Buah
68	Rak Besi 30 meter (Ukuran Panjang 4,95 M x Tinggi 2 m x 3 Buah)	1	Buah
69	Lemari Arsip pintu besi	4	Buah
70	Rak besi gudang logistik (47 meter)	1	Buah
71	Dispenser	3	Buah
72	Pemanas air tenaga surya	1	Buah
73	Televisi LED 32 inchi	2	Buah

74	Lampu hias (2 roll)	1	Buah
75	Lampu gantung	1	Buah
76	Kursi Sofa	2	Buah
77	Kursi Tunggu	6	Buah
78	Tenda pengungsi bencana	4	Buah
79	Velbed	56	Buah
	Peralatan Komputer	106	
78	Komputer Mainframe / Server	2	Unit
79	PC Unit	2	Unit
80	komputer/PC	1	Unit
81	Komputer Notebook	1	Unit
82	Komputer Mainframe / Server	1	Unit
83	Komputer / Notebook	2	Unit
84	Printer	3	Unit
85	Unit Power Supply	1	Unit
86	UPS/Stabilizer	1	Unit
87	Komputer/PC	9	Unit
88	Komputer Notebook	2	Unit
89	Printer Laser Jet	1	Unit
90	Printer Ink Jet	4	Unit
91	Komputer/PC	12	Unit
92	Komputer Note Book	2	Unit
93	Printer Ink Jet	5	Unit
94	Printer Laser Jet	5	Unit
95	UPS/Stabilizer	3	Unit
96	Printer	5	Unit
97	Komputer notebook	5	Unit
98	Printer	5	Unit
99	Printer Ink Jet Warna	6	Unit
100	Komputer/PC	4	Unit
101	Laptop	2	Unit
102	Komputer/PC	4	Unit
103	Tabelt/Tab	2	Unit
104	Laptop	2	Unit

105	Standing Computer Pendukung Website	1	Unit
106	Komputer/PC	2	Unit
107	Printer Dot Matrik	1	Unit
108	Printer Laserjet Warna	4	Unit
109	UPS	2	Unit
110	Hardisk External	4	Buah
	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	167	
111	Meja Kerja	8	Buah
112	Meja Kerja Anggota TRC	30	Buah
113	Meja Kerja	41	Buah
114	Kursi Kerja Anggota TRC	80	Buah
115	Kursi Kerja	5	Buah
116	Meja staf partisi	3	Buah
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	119	
	Alat Studio	17	
117	Kamera SLR	1	Buah
118	Proyektor/Infocus Sony VPL-EX 222	1	Buah
119	Proyektor	2	Buah
120	Kamera CCTV Avtech	1	Buah
121	Kamera/CCTV	1	Buah
122	Kamera Digital Nikon	1	Buah
123	Kamera	3	Buah
124	LED Proyektor/Infokus	1	Buah
125	Kamera DSLR + Lensa Kit	1	Buah
126	Kamera DSLR + Lensa Kit	1	Buah
127	Kartu Penyimpanan Media Ukuran 16 GB	4	Buah
	Alat Komunikasi	102	
128	Sound System	1	Unit
129	Radio SSB	1	Unit

130	Radio HT/FM	63	Unit
131	Antena/Tower (Repeater)	1	Unit
132	Pesawat UAV Copter (11 unit)	11	Unit
133	Pesawat UAV Fix Wings (1 unit)	1	Unit
134	Battery Choper (22 unit)	22	Buah
135	Battery Fix Wings (2 unit)	2	Buah
	Alat-alat Kedokteran		
	Alat Kedokteran	106	
136	Oxigen	101	Buah
137	Oxigen	1	Buah
138	Tandu	2	Buah
139	Folding bad aluminium	2	Buah
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan		
	Persenjataan Non Senjata Api	91	
140	Gri-gri	2	Buah
141	Binocular	2	Buah
142	Gri-gri	2	Buah
143	Ascender	2	Buah
144	Full body hernes	2	Buah
145	Tendem	2	Buah
146	Kunci pintu otomatis	1	Buah
147	Kunci pintu otomatis	1	Buah
148	Baju lapangan anti flame resistant (12 set)	12	Buah
149	Baju pakaian tahan api pemadam kebakaran	13	Buah
150	Sarung tangan pemadam kebakaran	13	Buah
151	Sepatu pemadam kebakaran	13	Buah
152	Helem pemadam kebakaran	13	Buah
153	Masker	13	Buah

Sumber Data : Desember 2019

1.5. Permasalahan Utama Penanggulangan Bencana Provinsi Riau

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (prabencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang 24 Tahun 2007. Apabila diterapkan kedalam daur program kerja, maka program dan kegiatan penanggulangan bencana merupakan siklus sistemik kegiatan.

Secara umum kegiatan itu menyangkut Data dan Informasi Kebencanaan, kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi yang konsisten dan berkesinambungan untuk pemenuhan SPM sub urusan kebencanaan dengan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) terkait, sesuai ketentuan umum dan tahapan didalam penanggulangan bencana, sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dari gambaran diatas, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, antara lain dapat dilihat dari berbagai hal sebagai berikut :

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan Pelayanan adalah sebagai berikut:

- 1) Luasnya cakupan wilayah yang dilakukan penanggulangan bencana dengan potensi bencana yang beragam.
- 2) Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain.
- 3) Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam.
- 4) Degradasi lingkungan akibat pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan.
- 5) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.

2. Peluang

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 3 (tiga) Fungsi, yaitu Fungsi Koordinasi, Fungsi Komando, Fungsi Pelaksana ketiga fungsi ini memberikan kekuatan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi.

Ketiga Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini mampu diimplementasikan dengan baik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Riau, hal ini dapat dilihat dari operasional Satuan Tugas Pos Komando Utama Operasi Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau yang mampu mengintegrasikan personil dari background yang berbeda dalam satu kesatuan Pos Komando Utama.

Dukungan Peralatan berupa Helicopter dan Pesawat Teknologi Modifikasi Cuaca serta Dana Siap Pakai (DSP) kepada BPBD Provinsi Riau dalam melakukan tugas penanggulangan bencana di Provinsi Riau menjadi peluang yang harus dioptimalkan pelaksanaannya. Inventarisasi keterlibatan swasta/dunia usaha dalam kewajiban CSR nya agar dapat diarahkan untuk mendukung penanggulangan bencana di Provinsi Riau.

Demikian juga dari pihak legislatif yang sudah beberapa kesempatan diikutsertakan dalam tugas penanggulangan bencana sehingga membuka cakrawala pemikiran semua pihak bahwa keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau sangat penting dan strategis, ketika situasi genting dan darurat keberadaan lembaga ini menjadi tumpuan dan harapan semua orang untuk berkoordinasi dengan Gubernur, Sekretaris Daerah selaku ex. Officio Kepala BPBD, Kepala Bappeda dan DPRD agar dapat memberikan perhatian dan dukungan yang serius terkait penguatan anggaran yang ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau walaupun masih jauh dari usulan kebutuhan anggaran penanggulangan bencana.

Untuk menyikapi peluang ini agar penggunaan anggaran bisa digunakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran maka perlu dipersiapkan Rencana Strategis yang komprehensif, terukur dan mengakomodir semua persoalan yang ada untuk dicarikan solusinya. Selain itu keberadaan Bidang Data dan Informasi dapat menjadi jembatan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam berkoordinasi untuk Provinsi Riau yang tangguh dalam menanggulangi bencana.

Berdasarkan gambaran diatas dapat disimpulkan beberapa peluang yang dapat dijadikan dalam analisa SWOT :

1. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan risiko bencana.
3. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Tersedianya Belanja Tak Terduga (BTT) yang telah dialokasikan jika status siaga darurat bencana telah ditetapkan, agar dapat membantu dalam penanggulangan bencana.

5. Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait serta lembaga non Pemerintah, dunia usaha dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dengan melihat tantangan dan peluang yang ada, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang akan menjadi dasar dalam penentuan strategi kebijakan dalam penanggulangan bencana di Provinsi Riau :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Diperlukannya Sumber Daya Manusia yang terlatih dalam penanggulangan bencana.	Setiap tahunnya hanya dapat melakukan pelatihan terkait penanggulangan bencana sebanyak 50 orang sampai dengan 60 orang relawan	1. Dukungan Regulasi dari Pemerintah Pusat tentang penetapan anggaran kebencanaan di daerah dari besaran APBD nya. 2. Pemerataan pelatihan untuk relawan di tiap-tiap Kabupaten/Kota Provinsi Riau 3. Belum memadainya jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Belum tersedianya data relawan yang sudah mendapatkan pelatihan
2.	Diperlukannya Sarana dan Prasarana pendukung penanggulangan bencana.	Sarana dan Prasarana masih belum representatif seperti Pusdatin dan peralatan penanggulangan bencana	1. Keterbatasan pagu anggaran dalam pembelian peralatan. 2. Penggunaan peralatan dilapangan dapat memperpendek masa umur peralatan. 3. Masih terbatasnya sarana prasarana operasional dan sistim informasi penanggulangan bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas.

Selanjutnya isu-isu strategis terkait Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 :

1. Penguatan Pengurangan Resiko Bencana
- Penanggulangan Bencana dititikberatkan pada pengurangan resiko bencana, hal ini menjadi paradigma baru penanggulangan bencana, pemahaman terhadap pengurangan resiko bencana sangat minim. Dalam menyikapi isu ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau mesti menjadi pelopor untuk pengurangan resiko bencana di Provinsi Riau agar masyarakat Riau terlindungi dari ancaman bencana dan mengurangi dampak yang terjadi dengan semangat *zero accident*.
2. Pembenahan Sistem Penanggulangan Bencana
- Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau selama ini cenderung bersifat Responsif, seharusnya dilakukan secara preventif, untuk mewujudkan itu perlu dibuat

Sistem Penanggulangan Bencana yang handal dengan menerapkan Manajemen Bencana baik pada saat Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) merupakan lembaga yang diamanatkan dalam hal penyampaian data dan informasi kebencanaan sesuai amanat SPM tentang pelayanan informasi Rawan Bencana yang tercantum dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021.

3. Pemulihan Pasca Bencana

Penanganan Bencana selama ini selalu fokus pada saat kejadian bencana, ketika bencana telah berakhir semua dianggap sudah berakhir, sebagaimana yang kita saksikan terhadap jalan, turab, bangunan roboh akibat bencana terbiarkan begitu saja hingga bertahun-tahun. Seharunya sesuai dengan paradigma baru penanggulangan bencana pemulihan pasca bencana perlu dilakukan untuk mengembalikan pulihnya aktivitas masyarakat seperti seharusnya.

4. Penguatan Kelembagaan

Sebagai Lembaga yang dituntut eksistensinya agar mampu menjalankan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau masih sangat terbatas dalam hal sarana, prasarana, serta penguatan kapasitas aparatur tanggap darurat bencana. Untuk itu perlu adanya pelatihan bagi aparatur kebencanaan dalam mengupdate ketrampilannya.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Penanggulangan Bencana adalah tanggung jawab bersama yaitu, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, namun saat ini pemahaman penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama masih sangat minim sehingga perlu disosialisasikan agar masyarakat dan dunia usaha bisa berperan serta didalam penanggulangan bencana. Inventarisasi terkait dana CSR dunia usaha juga perlu dilakukan agar kewajiban dunia usaha tersebut dapat diarahkan untuk penanggulangan bencana di Provinsi Riau.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2. 1 Perencanaan Strategis

Upaya mencapai tujuan pembangunan bersama, perlu ditopang dengan komitmen dan langkah gerak yang sinergis instansi pemerintah. Oleh karena itu dalam mewujudkan kinerja instansi, BPBD Provinsi Riau memerlukan sebuah landasan dalam melaksanakan kinerja tugas pokok dan fungsi yang dipayungi dalam visi dan misi BPBD Provinsi Riau. Visi dan misi BPBD Provinsi Riau seperti tercantum pada Renstra Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

2. 1.1 Visi dan Misi

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2019-2024 yang tercantum dalam RPJMD adalah :

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia”

Visi Riau untuk pembangunan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2024 memiliki makna berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul dengan penjelasan sebagai berikut:

Berdaya Saing	– Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) – Meningkatkan Kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar – Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan kemandirian daerah
Sejahtera	– Mengurangi ketimpangan sosial – Menanggulangi kemiskinan – Menurunkan tingkat pengangguran
Bermartabat	– Meningkatkan kehidupan beragama – Melestarikan adat istiadat – Mengembangkan nilai sosial dan budaya
Unggul	– Prestasi di bidang seni, budaya dan agama – Prestasi di bidang olahraga – Terbaik dan terdepan dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan – Terobosan dan inovasi daerah

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehubungan dengan itu, dalam mewujudkan visi Provinsi Riau 2019-2024 maka misi pembangunan jangka menengah, meliputi:

- Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.**
- Misi 2: Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.**
- Misi 3: Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.**
- Misi 4: Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.**
- Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.**

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau, dalam rangka mendukung visi misi tersebut BPBD Provinsi berkontribusi dengan mendukung misi ke 2 (dua) yaitu **Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan**. Seperti diketahui, dengan slogan *Riau Bebas Asap* bermaksud merubah paradigma bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, penanganan bencana banjir, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat Riau, bahkan masyarakat negara tetangga. Dengan demikian BPBD sudah ikut mendukung tercapainya misi ke 2 (dua) Pemerintah Provinsi Riau.

Seperti diketahui, Visi Pemerintah Provinsi Riau adalah; *"Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berdaya saing tinggi, terhapusnya kemiskinan serta tersedianya lapangan kerja"*. sedang Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah; *"Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana"*, maka dengan semangat dan alasan filosofis itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau merumuskan Visi:

"Terwujudnya Ketangguhan Provinsi Riau Dalam Menghadapi Bencana"

Dengan slogan *Riau Bebas Asap* bermaksud merubah paradigma bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, penanganan bencana banjir, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat Riau, bahkan masyarakat negara tetangga.

2. 1.2 Tujuan dan Sasaran BPBD Provinsi Riau

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi, dan rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa depan.

Berdasarkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau serta memperhatikan potensi bencana yang ada di Provinsi Riau, maka penanggulangan bencana diarahkan kepada pencapaian tujuan yaitu Terwujudnya Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau.

2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Dengan mengacu kepada misi dan tujuan penanggulangan bencana, maka sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2021 adalah terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Riau, dimana definisi penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah terdiri dari :

- 1) Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB).
- 2) Penanganan kedaruratan bencana.
- 3) Pemulihan pasca bencana

Untuk lebih jelasnya tentang tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan BPBD Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut ini :

VISI Pemerintah Provinsi Riau dalam RPJMD Riau Tahun 2019-2024:

"Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia".

MISI RPJMD Riau ke – 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	Terlaksananya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	1. Menyusun Regulasi dan Kelembagaan melalui upaya pengurangan resiko bencana. 2. Menyusun dokumen kebencanaan yang berbasis masyarakat dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan. 3. Mengembangkan sistem peringatan dini dalam upaya pengurangan resiko bencana. 4. Memberikan Informasi dan Data terkait Rawan Bencana 5. Pengembangan dukungan evakuasi dan penyelamatan korban bencana. 6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana. 7. Peningkatan SDM dalam Penanganan Darurat 8. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam mendata perhitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana.	1. Penyusunan SOP capaian SPM Penanggulangan Bencana Provinsi Riau. 2. Pembentukan Desa Tangguh Bencana. 3. Pembentukan Forum PRB di berbagai wilayah (Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota, Provinsi). 4. Melakukan pendidikan dan pelatihan. 5. Sosialisasi pemasangan Early Warning System. 6. Mengoptimalkan PUSDALOPS dan PUSDATIN di Provinsi, Kabupaten/Kota 7. Mengaktifkan Tim Reaksi Cepat dalam rangka dukungan ke Kabupaten/Kota 8. Menyediakan logistik dan peralatan dalam rangka penanganan darurat bencana. 9. Melatih lebih banyak SDM yang ahli dalam penanganan kedaruratan bencana. 10. Mendata Kerusakan Pasca Bencana 11. Melakukan Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan kerugian

		9. Membangun koordinasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka pemulihan pasca bencana	12. Melakukan perbaikan infrastruktur pasca bencana dengan berkoordinasi dengan dinas teknis terkait di Pemerintah Provinsi Riau
--	--	--	--

2. 2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (Penja) merupakan salah satu bagian dari tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Perjanjian Kinerja (Penja) disusun dengan merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2021 disusun dengan berdasarkan pada Ketentuan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Sebagaimana ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Penja merupakan dokumen yang mengikat dalam hal kinerja. Guna memastikan bahwa penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi dilaksanakan dengan penuh komitmen oleh penerima amanah maka dituangkanlah penugasan tersebut antara Gubernur Riau dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau dalam sebuah Perjanjian Kinerja (Penja). Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, BPBD Provinsi Riau pada tahun 2021 telah melaksanakan 3 (Tiga) program dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub Kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang didukung oleh **APBD Provinsi Riau Tahun 2021 sebesar Rp.15.133.445.249,-**. Pada **Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun 2021** terjadi beberapa pergeseran anggaran dan masuknya anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) sehingga pagu BPBD menjadi sebesar **Rp.21.365.099.423,-**.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau Tahun 2021, secara lengkap yang tercantum pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Murni	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	Prosentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	100 %	83,08%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA BPBD TAHUN 2021

Secara umum akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Tahun 2021 telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan capaian kinerja sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menggunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Skala Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja BPBD Tahun 2021

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2021 dan Rencana Strategis BPBD Provinsi Riau Tahun 2014-2019, hasil pengukuran kinerja tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis BPBD : Terlaksananya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Target Perubahan (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	Prosentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	100	90	83,08	92,31

Dari target kinerja untuk sasaran Terlaksananya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau, pencapaian untuk tahun 2021 menunjukkan hasil yang positif secara capaian kinerja sebesar 92,31%. Pada awal tahun anggaran 2021 didukung 14 Sub Kegiatan (sesuai permendagri 90 Tahun 2019), sedangkan karena adanya rasionalisasi anggaran akibat bencana Covid-19 pada perubahan anggaran ada 2 Sub Kegiatan yang terasionalisasi dan menyebabkan penurunan target pada perubahan anggaran tahun 2021.

3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja BPBD Tahun 2020 dan Tahun 2021

Pada Tahun 2020 berbeda dengan tahun 2021 karena mulai pada tahun 2021 Program dan Kegiatan harus disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 yang dibakukan oleh Kemendagri. Untuk mengukur capaian kinerja dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2020 dan 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target Perubahan (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target Perubahan (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	Prosentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	84,61	84,61	100	90	83,08	92,31

Secara umum capaian 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami sedikit penurunan. Hal ini karena masih adanya rasionalisasi akibat bencana covid-19 yang ada ditahun 2020 dan 2021 masih berlanjut, sehingga beberapa sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

3.1.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja BPBD Tahun 2021 dan Renstra BPBD Tahun 2019-2024

Pada Revisi Renstra BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sudah mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 dalam rangka pemetaan kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019. Perbandingan target dan realisasi kinerja BPBD Tahun 2021 dengan Renstra BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2021 dan
Capaian Renstra BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2021	Capaian tahun-n terhadap target akhir
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	Prosentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	100	83,08	83,08

Berdasarkan hail tabel perbandingan capaian kinerja diatas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Renja Tahun 2021 terhadap Renstra BPBD sebesar 83,08%. Diharapkan nantinya pada tahun berikutnya aka nada kenaikan terhadap kinerja Renja tahun 2022.

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

Sasaran Kinerja BPBD Provinsi Riau pada Tahun 2021 yaitu Terlaksananya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau dengan indicator kinerja yaitu Prosentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau.

Pada tahun anggaran 2021 realisasi kinerja BPBD Provinsi Riau sebesar 83,08% diakibatkan beberapa permasalahan/kegagalan yang dihadapi dan menyebabkan serapan anggaran rendah yaitu :

1. Pada Sub Kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana, terdapat Belanja Hibah Rp.2.000.000.000. untuk penanganan Covid-19 namun terkendala Pergub tentang Hibah sehingga tidak terealisasi.

- 2. Pada sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana anggaran belum dapat dibayarkan sebesar Rp. 296.346.700 karena dokumen KRB belum mendapat persetujuan BNPB disebabkan ada beberapa bagian yang masih harus diperbaiki.
- 3. Terdapat efisiensi anggaran dari BTT untuk penanganan Karhutla sebesar Rp. 2.631.160.100 karena kondisi yang terkendali Pada Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana yang bersifat situasional.
- 4. Adanya 2 sub kegiatan yang terasionalisasi akibat pandemi covid 19/ adanya aturan PPKM sehingga sub kegiatan tidak bisa dilaksanakan.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut diatas maka dijadikan catatan khusus/solusi agar pada tahun berikutnya tidak terjadi masalah yang sama, beberapa solusinya yaitu :

- 1. Melaksanakan sub kegiatan penanggulangan bencana Karhutla semaksimal mungkin dengan berdasarkan pada aturan tentang protap penanganan bencana Karhutla.
- 2. Menganggarkan kembali kegiatan yang sekiranya prioritas dan penting pada tahun berikutnya.
- 3. Mengajukan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sesuai prioritas kebutuhan penanggulangan bencana dan melalui pergeseran anggaran.

3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun 2021 BPBD pada anggaran Murni mempunyai pagu sebesar Rp. 15.133.445.249 dan pada perubahan anggaran tahun 2021 dengan masuknya Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanggulangan bencana, maka pagu BPBD Provinsi Riau menjadi sebesar Rp. 21.365.099.423,-.

Tabel 3.5
Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Perubahan Pagu	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	$6 = \frac{5}{4} \times 100\%$	7	8	$9 = \frac{8}{7} \times 100\%$
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	Prosentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	90	83,08	92,31	21.365.099.423	15.480.238.528	72,46

Berdasarkan tabel diatas Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran strategis BPBD Provinsi Riau, adalah sebesar Rp.15.480.238.528,- atau 72,46% dari total pagu sebesar Rp. 21.365.099.423,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 27,54 % dari pagu anggaran yang ada.

Tabel 3.6
Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=4-5
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	Prosentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	92,31	72,46	19,85

Berdasarkan tabel diatas Prosentase Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran strategis BPBD Provinsi Riau, adalah sebesar 72,46% dengan capaian kinerja sebesar 92,31%. Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar 19,85 % dari capaian kinerja yang dilaksanakan.

3.1.6 Analisis Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, BPBD Provinsi Riau pada Perubahan Anggaran tahun 2021 memiliki 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 28 (Dua Puluh Delapan) Sub Kegiatan.

Dari 28 Sub Kegiatan tersebut ada yang menunjang ataupun mengalami kegagalan dalam pencapaian kinerja. Untuk lebih jelasnya seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Capaian program/kegiatan/sub kegiatan BPBD Provinsi Riau Tahun 2021

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target Perubahan	Realisasi	Capaian	Program/kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (DPPA)	Realisasi	
									Rp	%
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	Prosentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	90	83,08	92,31	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI : a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah c. Administrasi Umum Perangkat Daerah d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Mebel 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan listrik 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp. 9.107.465.889 Rp. 101.945.820 Rp. 11.000.000 Rp. 337.347.660 Rp. 128.818.000 Rp. 105.336.988 Rp. 398.805.000 Rp. 197.366.066 Rp. 11.850.000 Rp. 337.840.000 Rp. 879.884.302 Rp. 255.000.000 Rp. 59.980.000 Rp. 283.931.000	Rp. 9.042.337.976/ 94,84 % Rp. 101.887.500/ 99,94 % Rp. 10.968.000/ 99,71 % Rp. 336.593.973/ 99,78 % Rp. 128.790.000/ 99,98 % Rp. 94.062.605/ 89,30 % Rp. 378.020.753/ 94,79 % Rp. 188.303.000/ 95,41 % Rp. 10.000.000/ 84,39 % Rp. 259.110.115/ 76,70 % Rp. 852.190.082/ 96,85 Rp. 250.710.700/ 98,32% Rp. 58.700.000/ 97,87% Rp. 277.062.000/ 97,58%	

						2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA : a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	15. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per JenisBencana 16. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 17. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 18. Pengelolaan Risiko Bencana 19. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 20. Penanganan Pascabencana Provinsi 21. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 22. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana 23. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 24. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 25. Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah 26. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Rp. 72.932.850 Rp. 482.782.000 Rp. 50.966.000 Rp. 153.691.320 Rp. 217.559.676 Rp. 170.191.000 Rp. 87.513.446 Rp. 3.888.296.850 Rp. 253.556.600 Rp. 3.284.604.000 Rp. 150.677.737 Rp. 276.921.288	Rp. 72.932.817/ 100% Rp. 186.435.300/ 38,62% Rp. 44.479.295/ 87,27% Rp. 123.922.620/ 80,63% Rp. 205.230.610/ 94,33% Rp. 139.084.450/ 81,72% Rp. 70.441.446/ 80,49% Rp. 1.389.422.063/ 35,73% Rp. 231.559.500/ 91,32% Rp. 653.443.900/ 19,89% Rp. 114.988.300/ 76,31% Rp. 259.561.523/ 93,73%	
						3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DANPENYELAMATAN NON KEBAKARAN a. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	27. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, danKemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NonKebakaran	Rp. 58.835.931	Rp. 0 / 0%	

3.2. REALISASI ANGGARAN

Disamping sumber daya manusia, pelaksanaan kinerja instansi tentu saja tidak terlepas dari dukungan pendanaan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Riau, pada tahun anggaran 2021, anggaran yang dipergunakan pada anggaran Murni sebesar Rp. 15.480.238.528,- (45,96%) dari pagu anggaran sebesar **Rp. 21.365.099.423,-**, secara ringkas komposisi realisasi penggunaan APBD Provinsi Riau tahun 2021 untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 9.042.337.976,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 5.956.150.224,-
3. Belanja Modal, sebesar Rp. 481.750.328,-

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan Umum

BPBD Provinsi Riau yang termasuk dalam urusan pendukung pada RPJMD Provinsi Riau, dengan tugas pokok dan fungsi utama melaksanakan penanggulangan bencana dari mulai Pra Bencana, Darurat Bencana hingga Pasca Bencana di Provinsi Riau, tentu saja memerlukan dukungan ketersediaan sumber daya manusia dan modal yang memadai dan handal. Pengelolaan SDM diarahkan untuk mewujudkan insan peduli dan tangguh terhadap bencana yang profesional, respon cepat dan didukung dengan sarana prasarana yang berkualitas.

Berdasarkan pada hasil uraian dan data-data pada bab – bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BPBD Provinsi Riau **berhasil** dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Hal tersebut didasari oleh pencapaian terhadap semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Baik**, pada tahun 2021 hanya terdapat beberapa hotspot dan firespot dilapangan di Kabupaten/Kota dan dapat segera ditanggulangi sebelum menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas lagi. Hal ini berkat kesigapan satgas gabungan Karhutla Kab/Kota dan Provinsi serta dukungan dari berbagai pihak dalam mencegah bencana Karhutla diwilayah masing-masing sebelum membesar area kebakarannya. Walaupun adanya beberapa kegiatan yang penyerapannya rendah karena adanya bencana covid-19 mengakibatkan sedikit mengganggu kinerja, akan tetapi dukungan dari APBN lewat BNPB dapat membantu tercapainya kinerja BPBD Provinsi Riau untuk menjaga Provinsi Riau tidak berlarut larut dalam menghadapi Karhutla Tahun 2021.

Kesimpulan terhadap hasil kinerja tersebut didukung oleh data-data sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja BPBD Berdasarkan Perubahan Target yang akan dicapai sebesar 90% realisasi sebesar 83,08%, hal ini berarti bahwa capaian kinerja BPBD Provinsi Riau pada tahun 2021 sebesar 92,31% terbilang cukup baik. Walaupun capaian secara pagu anggaran hanya sebesar 72,46% dimana hal ini disebabkan ada

kegiatan yang rendah realisasinya. Hal ini berarti bahwa BPBD Provinsi Riau sudah cukup efisien memaksimalkan kinerja dengan pagu anggaran tersebut, ini berarti efisiensi anggaran yang telah dilakukan BPBD Provinsi Riau sebesar 19,85% untuk mencapai kinerja 92,31%.

b. Penyerapan anggaran Tahun 2021 sebesar 72,46%, apabila dibandingkan Tahun 2020 sebesar 66,89% maka terjadi kenaikan sebesar 5,57%. Hal ini disebabkan ada beberapa sub kegiatan yang mempunyai serapan rendah yaitu karena beberapa hal yaitu :

1. Pada sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana serapan anggaran rendah karena Dokumen KRB belum mendapat persetujuan dari BNPB karena ada beberapa bagian yang harus diperbaiki oleh pelaksana (LPPM UNRI).
2. Pada Sub Kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana serapan anggaran rendah karena Terdapat Belanja Hibah Rp.2.000.000.000. untuk penanganan Covid-19 namun terkendala Pergub tentang Hibah.
3. Pada Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana serapan anggaran rendah karena Terdapat efisiensi dari Anggaran BTT untuk penanganan Karhutla karena kondisi yang terkendali dari sub kegiatan yang bersifat situasional.
4. Pada Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana serapan anggaran rendah karena Rasionalisasi anggaran dan juga akibat pandemi covid 19/ adanya aturan PPKM sehingga sub kegiatan tidak bisa dilaksanakan.
5. Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran serapan anggaran rendah karena bentuk kegiatan berupa Operasional Posko Karhutla, tidak dapat dilaksanakan akibat terkendala dampak pandemi Covid-19 dan adanya aturan PPKM.

4.2. Langkah Strategis Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Berdasarkan hasil analisa di atas, diperlukan upaya dan strategi yang tepat guna mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja BPBD Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan terlebih dahulu kebutuhan anggaran dalam Belanja Tak Terduga (BTT) agar dapat dilaksanakan dengan seefisien mungkin.
2. Mengoptimalkan sumber-sumber dana lainnya
3. Melaksanakan sub kegiatan penanggulangan bencana Karhutla semaksimal mungkin dengan berdasarkan pada aturan tentang protap penanganan bencana Karhutla;
4. Menganggarkan kembali pada tahun 2022 sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2021.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Provinsi Riau Tahun 2021 ini disusun, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi perbaikan kinerja kelembagaan yang akan datang.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU

M. EDY AFRIZAL, SE, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19730421 199203 1 002